

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2013

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2008 tentang Target dan Standar Operasional SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 08 Tahun 2010 tentang Kependudukan.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 15 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga.

B. Gambaran Umum Satuan Kerja Pemerintah Daerah.

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2008, dengan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri :
 1. Subbag Program dan Pelaporan
 2. Subbag Keuangan
 3. Subbag Umum
- c. Bidang Kependudukan, terdiri dari :
 1. Seksi Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk.

2. Seksi Data dan Informasi Kependudukan.
- d. Bidang Catatan Sipil, terdiri dari :
 1. Seksi Pencatatan Sipil
 2. Seksi Informasi dan Dokumentasi Pencatatan Sipil
- e. UPTD
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2008 tanggal 6 Desember 2008 tentang penjabaran Uraian Tupoksi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam merumuskan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi pengawasan, pengendalian, perizinan, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan dan Pencatatan sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas dibidang kependudukan dan Pencatatan sipil yang meliputi pengawasan, pengendalian, perizinan, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan dan Pencatatan sipil serta pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD;
- b. Penyusunan program dibidang kependudukan dan pencatatan sipil yaitu meliputi pengawasan, pengendalian, perizinan, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan dan Pencatatan sipil serta pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD;
- c. Pelaksanaan program kerja dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu meliputi pengawasan, pengendalian, perizinan, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan dan Pencatatan sipil serta pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD;
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi pengawasan, pengendalian, perizinan, pelayanan

umum, penyuluhan kependudukan dan Pencatatan sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UTPD;

- e. Koordinasi dan fasilitas tugas-tugas dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi pengawasan, pengendalian, perizinan, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan dan Pencatatan sipil serta pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas-tugas dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi pengawasan, pengendalian, perizinan, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan dan Pencatatan sipil Serta pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

3. Kepegawaian

3.1. Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2013 sejumlah 34 Orang , dengan perincian sebagai berikut :

1) Kepala Dinas	1 orang
2) Sekretaris	- orang
a. Kepala Sub Bagian Program & pelaporan ...	1 orang
b. Kepala Sub Bagian Umum	1 orang
• Staf Sub Bagian Umum	4 orang
c. Kepala Sub Bagian Keuangan	1 orang
• Staf Sub Bagian Keuangan	2 orang
3) Kepala Bidang Kependudukan	1 orang
a. Kepala Seksi Pendaftaran dan Penc.Penddk.	1 orang
• Staf Seksi Pendaftaran dan Penc.Penddk.	5 orang
b. Kepala	Kepala
Seksi Data dan Inf.Kependudukan	1 orang
• Staf	Staf
Seksi Data dan Infor.Kependudukan..	2 orang
4) Kepala Bidang Pencatatan Sipil	1 orang
a. Kepala	Kepala
Seksi Pencatatan Sipil.....	1 orang
• Staf Seksi Pencatatan Sipil	9 orang

- b. Kepala Seksi Informasi & Dokumen Penc.Sipil. - orang
 - Staf Seksi Inf. & Dok. Penc. Sipil 3 orang

Status Kepegawaian sebagai berikut :

- 1. Jumlah PNS 27 orang
- 2. Jumlah Tenaga PTT dengan SK Bupati 2 orang
- 3. Jumlah Tenaga Harian Lepas dengan Surat Tugas Kepala Dinas 5 orang

Sedangkan 1(satu) orang PNS Sdr.Joko Suyanto,S.Kom diperbantukan di Panwas Kabupaten Purbalingga sejak tahun 2013.

3.2 Jabatan Struktural :

Jumlah Jabatan Struktural yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk masing-masing eselon adalah :

- 1. Eselon II b sejumlah 1 (satu) orang (Kepala Dinas) dan telah memenuhi syarat kepangkatan IV/b serta telah mengikuti pendidikan penjenjangan Spama/Diklatpim II pada Tahun 2002
- 2. Eselon III a sejumlah 1 (satu) orang (Sekretaris) namun jabatan sekretaris kondisi 31 Desember 2013 terjadi kekosongan dikarenakan per 1 September 2013 Purna Tugas belum ada pengganti
- 3. Eselon III b sejumlah 2 (dua) orang (Kabid Kependudukan dan Kabid Pencatatan Sipil) dan telah memenuhi syarat kepangkatan IV/a dan pendidikan penjenjangan Adum Tahun 1998 (Kabid Kependudukan), sedangkan 1 (satu) orang memenuhi syarat kepangkatan IV/a dan telah mengikuti pendidikan penjenjangan Adumla Tahun 1996 (Kabid Pencatatan Sipil)
- 4. Eselon IV a sejumlah 6 (lima) orang dan 5 (lima) telah memehuni syarat kepangkatan yaitu III/c s/d III/d dan telah mengikuti pendidikan penjenjangan Adum/Adumla dan Diklat PIM IV, Eselon IV/a pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada 1 kekosongan yaitu pada Kepala Seksi Informasi dan Dokumen Pencatatan Sipil.

3.3. Kepangkatan

1. IV /b : 1 orang
2. IV /a : 2 orang
3. III /d : 3 orang
4. III /c : 5 orang
5. III /b : 10 orang
6. III /a : 2 orang
7. II /d : 2 orang
8. II /c : 1 orang
9. II /b : -
10. II /a : -
11. I /A : -
12. I /B : 1 orang

3.4 Pendidikan :formal :

Pendidikan Formal Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

- | | |
|------|-----------|
| S 2 | : 5 orang |
| S 1 | : 7 orang |
| D 3 | : 5 orang |
| SLTA | :15 orang |
| SLTP | : - |
| SD | : 2 orang |

3.5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

1. Diklat Stuktural : 9 orang
2. Diklat Tehnis / Fungsional : 2 orang

4. Daftar Aset yang dikelola.

Berdasarkan pada hasil Penelusuran Aset Tahun 2011, dan Inventarisasi tahun 2012 Aset yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

1. Tanah seluas 2049 m² beserta Bangunannya dengan nilai Rp. 536.838.000 (*lima ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*).
2. Alat transportasi 2 buah kendaraan roda empat, yaitu

- Jenis MPNP Minibus (INOVA) dengan nomor Polisi R 59 C seharga Rp. 259.910.000 ; (Dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)
 - Jenis stasiun wagon (Toyota) dengan nomor polisi R 9504 C seharga Rp. 44.000.000 (*empat puluh empat juta rupiah*),
- Serta 11 buah kendaraan roda 2, yaitu :
- Jenis Honda 8 buah
 - Jenis suzuki 1 buah
 - Jenis Yamaha 2 buah

Sebagai pendukung dalam melaksanakan tugas Administrasi berupa server, Lap Top, CPU printer dan lain-lain.

5. Kondisi Ekonomi

Potensi yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugasnya adalah :

- a. Kecamatan sejumlah 18 yang terdiri dari 224 desa dan 15 kelurahan dan 4.980 RT dan 1.539 RW.
- b. Jumlah penduduk 1.038.242 orang yang terdiri dari laki-laki 527.631 orang dan perempuan 510.611 orang.
- c. Jumlah Kepala Keluarga menurut jenis kelamin, laki-laki 273.748 orang dan kepala keluarga perempuan 62.050 orang
- d. Jumlah penduduk berdasarkan kepemilikan KTP , sejumlah 639.111 Jumlah tersebut berdasarkan perekaman E- KTP dan belum memiliki data berdasarkan jenis kelamin.
- e. Kepemilikan akta kelahiran sampai dengan 31 Desember tahun 2013 sejumlah 678.323 orang.

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

A. Visi dan Misi

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah : “Tertib Administrasi Kependudukan untuk melindungi hak-hak dan memberikan kepastian status hukum penduduk dalam mewujudkan kesejahteraan melalui pelayanan yang mudah, murah, cepat, tepat, akurat dan profesional

B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan dasar pandangan dari pimpinan.

Kebijakan yang ada dibuat secara formal, disesuaikan dengan kompleksitas permasalahan pada setiap aspek yang ada, yang dianggap penting dan mempunyai dampak secara luas bagi masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan kinerja aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam rangka penerbitan Akta Catatan Sipil, KTP dan KK.
3. Menyediakan sarana dan prasarana sebagai penunjang tersedianya data dan informasi kependudukan yang akurat.

C. Prioritas Daerah

1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah, terdiri dari :
 - a. Kegiatan Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran.
 - b. Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi
 - c. Pmeliharaan Sarana Prasarana Kantor.
 - d. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor.
 - e. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawaiii.
2. Program Penataan Administrasi Kependudukan, terdiri dari :

- a. Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan.
- b. Sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c. Pelaksanaan E – KTP
- d. Pencatatan Peristiwa Kelahiran dan Register
- e. Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil
- f. Pemeliharaan Jaringan Komunikasi Data

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Target dan Realisasi Pendapatan

Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, KK, Akta Capil dengan target Rp. 900.000.000 Realisasi Rp. 1.481.485. (164,61 %).

2. Permasalahan dan Solusi

Target pendapatan berjalan lancar dan realisasi melebihi target yang telah ditentukan sehingga tidak ada permasalahan.

B. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Target dan Realisasi Belanja

Dalam melaksanakan program dan kegiatan didukung dengan belanja daerah yang telah direalisasikan sebagai berikut :

1. Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran Rp. 406.643.000 Realisasi Rp. 392.581.551 (96,54%)
2. Rapat-rapat Koord & Konsultasi Rp. 66.810.000 Realisasi Rp. 65.116.676 (97,47%)
3. Pemeliharaan Sarpras Kantor Rp. 173.535.000 Realisasi Rp. 157.368.694 (90,68 %)
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Rp. 252.945.000 Realisasi Rp. 249.140.500 (98,50%).
5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Rp. 10.000.000 Realisasi Rp. 6.010.000 (60,10%)
6. Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan Rp. 213.000.000 Realisasi Rp. 209.516.650 (98,36 %)
7. Sosialisasi Kependudukan Rp. 14.400.000 Realisasi Rp. 12.507.000 (86,37 %)
8. Pelaksanaan E-KTP Rp. 111.931.000 Realisasi Rp. 103.696.675 (92,64 %)

9. Pencatatan Peristiwa Kelahiran dalam Register Rp. 22.935.000
Realisasi Rp. 22.935.000 (100 %)
 10. Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil 77.900.000 Realisasi Rp.
76.256.000 (97,98 %).
 11. Pemeliharaan Jarkomdat Rp. 102.640.000 Realisasi Rp.
100.574.000 (93,99 %).
- (Lampiran (3) LKD)

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Urusan Wajib yang dilaksanakan

1. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Target dan Panduan Operasional SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota berdasarkan Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tanggal 19 Desember 2008.

Secara umum pelaksanaan pembangunan dibidang kependudukan telah dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Kependudukan sebagai berikut :

Jenis Pelayanan	SPM Indikator	Nilai	Rencana Target Pencapaian 2013	Capaian (%)	Rumus Perhitungan
Kependudukan	1. Cakupan Penerbitan KTP	100%	100%	85,22	$\frac{\text{Jml KTP ber NIK yg diterbitkan} \times 100}{\text{Jml Penduduk wajib KTP}}$ $\frac{639.111 \times 100\%}{749.940}$
	2. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	100%	80 %	92,72	$\frac{\text{Jml pend lhr yg ber akta} \times 100}{\text{Jml kelahiran hdp th ybs}}$ $\frac{11.861 \times 100\%}{12.792}$

2. Realisasi Program dan Kegiatan

1) Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah

- a. Realisasi pelaksanaan kegiatan dimaksud yaitu terlayannya kebutuhan Stopmap Akta Catatan Sipil sebanyak 28.500, buah, Kutipan Akta Kelahiran 28,500 Kutipan Akta Kematian 100 lembar, Register Akta Kelahiran 570 Buku, dan lain lain

serta peralatan elektronik, alat rumah tangga kantor, langganan PAM, listrik, telepon.

Jumlah alokasi dana : Rp. 406.643.000 ;

Realisasi : Rp. 392.581.551;

Persentase : 96,54 %

b. Rapat-rapat Koord & Konsultasi

Realisasi pelaksanaan kegiatan dimaksud yaitu terlaksana perjalanan dinas dalam/luar daerah sebanyak 201 kali dan terpenuhinya Kebutuhan peserta rapat (konsumsi)

Jumlah alokasi dana : Rp. 66.810.000 ;

Realisasi : : Rp. 65.116.676 ;

Persentase: : 97,47%

c. Pemeliharaan Sapras Kantor

Realisasi pelaksanaan kegiatan dimaksud yaitu terpeliharanya 2 buah kendaraan roda 4 dan 11 buah kendaraan roda 2 yaitu penggantian suku cadang, BBM, perbaikan kantor, servis AC kantor, servis printer, CPU dan mesin ketik, serta barang-barang Inventaris kantor lainnya dengan

Jumlah alokasi dana : Rp. 173.535.000 ;

Realisasi : Rp.157.368.694 ;

Persentase : 90,68%

d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Realisasi pelaksanaan kegiatan dimaksud terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga tersedianya fasilitas kantor yang cukup memadai.

Jumlah alokasi dana : Rp. 252.945.000 ;

Realisasi : Rp. 249.140.500 ;

Persentase : Rp. 98.50

e. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Realisasi pelaksanaan kegiatan dimaksud yaitu mengirimkan 2 orang Pegawai untuk mengikuti Diklat ADB Administrator

Data Base Kependudukan 1 orang, dan Diklat Pendaftaran Penduduk 1 orang sehingga akan meningkatkan Pengetahuan dan Kemampuan Khususnya di Bidang Kependudukan .

Jumlah alokasi dana : Rp. 10.000.000 ;

Realisasi : Rp. 6.010.000 ;

Persentase : 60,10%

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai realisasi hanya mencapai 60,10 % dikarenakan , pada Tahun 2013 tidak ada penawaran dari Lembaga Kediklatan tentang Diklat Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2) Program Penataan Administrasi Kependudukan :

a) Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan

Realisasi pelaksanaan kegiatan dimaksud yaitu terpenuhinya kebutuhan blanko KK sebanyak 35.500 set ,Blanko permohonan KTP 50.000, blanko permohonan KK 37.500 lembar , , serta kwitansi permohonan KTP/KK 1.750 buku dll.

Jumlah alokasi dana : Rp 213.000.000 ;

Realisasi : Rp. 209.516.650 ;

Persentase : 98,36 %

b) Sosialisasi Kependudukan

Realisasi pelaksanaan kegiatan dimaksud yaitu tersosialisasikannya tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Wilayah Kecamatan Purbalingga, Kalimanah, Kutasari, Kaligondang , Padamara dan Bojongsari.

Jumlah alokasi dana : Rp. 14.400.000 ;

Realisasi : Rp. 12.256. ;

Persentase : (86.37 %)

c) Pelaksanaan E-KTP

Realisasi pelaksanaan dimaksud terselenggaranya Perekaman E- KTP sejumlah 639.111 orang.

Jumlah alokasi dana : Rp. 111.931.000 ;

Realisasi : Rp. 103.696.675;
Persentase : 92,64 %

d) Pencatatan Peristiwa Kelahiran Dalam Register

Realisasi pelaksanaan kegiatan dimaksud tercatatnya peristiwa kelahiran dalam buku register sebanyak 24.769 orang.

Jumlah alokasi dana : Rp. 22.935.000 ;
Realisasi : Rp. 22.935.000 ;
Persentase : 100 %

e) Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil

Realisasi pelaksanaan dimaksud terlayannya pemohon Pembuatan Akta Kelahiran, Kematian , Perkawinan, perceraian, Kutipan dua dan lain lain.

Jumlah alokasi dana : Rp. 77.900.000. ;
Realisasi : Rp. 76.325;
Persentase : 97,98 %

f) Pemeliharaan Jaringan Komunikasi Data

Realisasi kegiatan dimaksud , terpeliharanya Jaringan Komunikasi Data yang mengalami kerusakan yang menghambat pelayanan KTP dan KK khususnya di Kecamatan kecamatan menjadi dapat berfungsi kembali..

Jumlah alokasi dana : Rp. 102.640.000 ;
Realisasi : Rp. 100.574.000 ;
Persentase : 97,99 %

3. Poses Perencanaan Pembangunan.

Proses perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil termuat dalam Renja SKPD dan RKA SKPD Tahun 2013.

4. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kurang memadai khususnya masalah transportasi hanya memiliki 2 buah kendaraan Roda 4, dan 11 kendaraan Roda 2..

Adapun untuk menunjang kegiatan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga didukung dengan perlengkapan berupa Komputer, Server, Printer, meja, kursi, dll.

5. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Laporan Kependudukan dari Tingkat Kecamatan sering terlambat
2. Sering terjadi kerusakan Jaringan sehingga menghambat proses pelayanan khususnya di Kecamatan kecamatan

b. Solusi

1. Penagihan laporan kependudukan dilakukan melalui telepon
2. Perbaiki jaringan khususnya di Kecamatan Kecamatan

6. Hal Lain Yang Perlu Dilaporkan

Tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan

B. Urusan Pilihan yang dilaksanakan

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dengan Indikator Cakupan Penerbitan KTP tahun 2013 100 % sampai dengan akhir Tahun Anggaran mencapai 85,22 % realisasi tersebut berdasarkan hasil perekaman E-KTP yaitu sampai akhir tahun anggaran 2013 telah terekam sejumlah 639.111 orang, sedangkan jumlah penduduk wajib KTP (> 17 dan/pernah/sudah menikah) sejumlah 749.940. Adapun target Indikator Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran tahun 2013 sebanyak 80 % & sampai akhir Tahun Anggaran mencapai 92,72 % realisasi hasil tersebut berdasarkan jumlah penduduk lahir yang berakta per jumlah kelahiran hidup pada tahun yang bersangkutan (2013)

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan tugas pembantuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 tidak ada.

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAH

Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 tidak melaksanakan tugas dimaksud.

BAB VII PENUTUP

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga yang dapat kami sajikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Semoga dapat menjadi gambaran secara lengkap kinerja serta realisasi program dan kegiatannya.

Purbalingga, 23 Januari 2014

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURBALINGGA

Drs. Nur Hamam, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19620614 198502 1 009